

## Konstruksi Maskulinitas dan Feminitas dalam Sistem Patriarki Kontemporer

<sup>1</sup>Gibran Muhammad

<sup>1</sup>Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Sumatera Utara

E-mail: <sup>1</sup>gibran.kosong123@gmail.com

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji konstruksi maskulinitas dan feminitas dalam sistem patriarki kontemporer, dengan fokus pada negosiasi identitas gender, manifestasi *toxic masculinity*, serta resistensi gerakan feminis terhadap dominasi simbolik di ruang publik dan privat. Menggunakan metode kajian literatur sistematis terhadap enam artikel terpilih dari tahun 2019–2025, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana struktur patriarki mereproduksi norma gender yang tidak setara melalui mekanisme kekuasaan simbolik. Temuan menunjukkan bahwa *toxic masculinity* bukan sekadar fenomena individual melainkan konstruksi sosial yang dikukuhkan oleh institusi keluarga, media, dan pendidikan. Resistensi feminis, baik dalam bentuk gerakan kolektif maupun negosiasi identitas personal, terbukti mampu menggoyahkan dominasi simbolik meskipun menghadapi tantangan struktural yang kompleks. Artikel ini berkontribusi pada pemahaman akademis tentang dinamika gender dalam konteks Indonesia dan global.

**Kata kunci :** *maskulinitas, feminitas, patriarki, toxic masculinity, gerakan feminis, dominasi simbolik, negosiasi identitas gender*

### ABSTRACT

This article examines the construction of masculinity and femininity within contemporary patriarchal systems, focusing on gender identity negotiation, manifestations of *toxic masculinity*, and feminist movement resistance to symbolic domination in public and private spaces. Employing a systematic literature review methodology analyzing six selected articles from 2019–2025, this study identifies how patriarchal structures reproduce inequitable gender norms through mechanisms of symbolic power. Findings reveal that *toxic masculinity* is not merely an individual phenomenon but a social construction reinforced by family institutions, media, and education. Feminist resistance—both in collective movements and personal identity negotiation—proves capable of disrupting symbolic domination despite facing complex structural challenges. This article contributes to academic understanding of gender dynamics in Indonesian and global contexts.

**Keyword :** *masculinity, femininity, patriarchy, toxic masculinity, feminist movement, symbolic domination, gender identity negotiation*

## 1. PENDAHULUAN

Gender sebagai konstruksi sosial telah menjadi objek kajian ilmu-ilmu sosial selama lebih dari setengah abad. Namun, relevansinya justru semakin meningkat di era kontemporer ketika transformasi sosial, kemajuan teknologi, dan gerak sosial feminis yang masif menghadirkan tegangan baru dalam relasi gender. Sistem patriarki—sebagai tatanan sosial yang menempatkan laki-laki di posisi dominan dalam struktur keluarga, ekonomi, politik, dan budaya—tidak lagi tampil dalam wajah tunggal yang monolitik. Ia bermetamorfosis, mengadaptasi dirinya ke dalam norma-norma “modern” sembari mempertahankan akar-akar kekuasaan yang membuat ketimpangan gender terus berlangsung (Johnson, 2022).

Konstruksi maskulinitas dan feminitas merupakan dua kutub identitas gender yang dibentuk secara sosial dan kultural, bukan sekadar ditentukan oleh biologi. Connell (2020) menegaskan bahwa maskulinitas bukanlah sifat bawaan laki-laki, melainkan praktik sosial yang diproduksi dan direproduksi melalui interaksi antarindividu, institusi, dan struktur. Dalam kerangka ini, 2018 maskulinitas hegemonik 2019—yakni bentuk maskulinitas yang paling dihargai dan dominan dalam hierarki gender tertentu—beroperasi bukan semata melalui paksaan fisik, melainkan melalui konsensus kultural dan internalisasi norma oleh seluruh anggota masyarakat, termasuk perempuan dan laki-laki yang tidak memenuhi standar hegemonik tersebut.

*Toxic masculinity* sebagai konsep telah mendapatkan perhatian besar dalam diskursus akademis maupun publik, terutama pasca gerakan #MeToo yang meledak secara global sejak 2017 dan terus bergema hingga pertengahan dekade 2020-an. Kupers (2019) mendefinisikan *toxic masculinity* sebagai

kumpulan norma maskulin yang mendorong agresivitas, penolakan terhadap emosi, dan dominasi terhadap perempuan—norma-norma yang pada akhirnya berdampak buruk tidak hanya bagi perempuan, tetapi juga bagi laki-laki itu sendiri. Di Indonesia, fenomena ini bersinggungan dengan konstruksi budaya patriarki yang kuat, nilai-nilai religius, dan tekanan normatif yang berbeda dari konteks Barat.

Gerakan feminis kontemporer tidak monolitik. Ia hadir dalam berbagai gelombang, strategi, dan ideologi—dari feminisme liberal yang memperjuangkan kesetaraan formal hingga feminisme radikal yang mempertanyakan struktur patriarki secara mendasar, serta feminisme interseksional yang mengakui kompleksitas pengalaman perempuan berdasarkan kelas, ras, agama, dan seksualitas. Dalam konteks Indonesia, gerakan feminis beroperasi dalam tegangan antara nilai-nilai tradisional, agama Islam, dan tuntutan modernisasi—sebuah negosiasi yang berlangsung tanpa henti di ruang publik maupun privat (Budianta, 2023).

Ruang publik dan ruang privat menjadi arena utama di mana dominasi simbolik gender dimainkan. Bourdieu (2022) menjelaskan dominasi simbolik sebagai bentuk kekuasaan yang beroperasi melalui penerimaan tak sadar dari tatanan yang mendominasi. Para perempuan, alih-alih menolak, sering kali ikut serta dalam mereproduksi norma-norma yang merugikan mereka sendiri. Mekanisme ini bekerja di dapur, ruang tamu, kantor, jalanan, media sosial, hingga parlemen—menjadikan ketimpangan gender bukan sebagai anomali melainkan sebagai “kewajaran” yang dinaturalisasikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji bagaimana maskulinitas dan feminitas dikonstruksi dalam sistem patriarki kontemporer; (2) menganalisis

toxic masculinity sebagai produk dan reproduksi struktur patriarki; (3) memahami negosiasi identitas gender dalam konteks dominasi simbolik; serta (4) memetakan bentuk-bentuk resistensi feminis terhadap dominasi tersebut, baik di ruang publik maupun privat.

## 2. LANDASAN TEORI

### Konstruksi Maskulinitas dalam Sistem Patriarki Kontemporer

Maskulinitas, dalam perspektif ilmu sosial kontemporer, tidak dipahami sebagai sesuatu yang dimiliki (a possession) melainkan sebagai sesuatu yang dilakukan (a practice). Connell (2020) mengembangkan konsep maskulinitas hegemonik untuk menggambarkan konfigurasi praktik gender yang melegitimasi posisi dominan laki-laki dalam tatanan patriarki. Yang krusial dalam teori Connell adalah klaim bahwa maskulinitas hegemonik tidak identik dengan seluruh laki-laki—banyak laki-laki pun berada dalam posisi subordinat dalam hierarki maskulinitas—namun semua laki-laki, dalam derajat tertentu, menikmati "patriarchal dividend," yakni keuntungan struktural dari tatanan yang mendominasi perempuan.

Messerschmidt (2019) memperkaya perspektif ini dengan menekankan bahwa maskulinitas bersifat situasional dan relasional. Dalam konteks yang berbeda—keluarga, tempat kerja, ruang olahraga, media sosial—laki-laki menegosiasikan dan mempraktikkan maskulinitas dengan cara yang berbeda-beda. Ini berarti bahwa patriarki bukan struktur yang kaku dan tidak berubah, melainkan struktur yang terus-menerus direproduksi melalui praktik-praktik sosial sehari-hari. Reproduksi ini melibatkan tidak hanya laki-laki, tetapi juga perempuan yang telah menginternalisasi norma-norma

patriarkal sebagai sesuatu yang "normal" dan "alami."

Di Indonesia, konstruksi maskulinitas dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling bertumpang tindih: nilai-nilai budaya Jawa yang menekankan kewibawaan dan pengendalian emosi pada laki-laki, tafsir keagamaan yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga (qawwam), serta narasi pembangunan Orde Baru yang membangun ideologi "Bapakisme" di mana laki-laki adalah kepala negara, kepala keluarga, dan sumber otoritas yang tak perlu dipertanyakan (Suryakusuma, 2021). Meskipun Orde Baru telah berakhir, residunya dalam konstruksi maskulinitas Indonesia masih terasa kuat.

Waling (2019) mengingatkan bahwa studi maskulinitas tidak boleh terjebak dalam essentialisme—yakni anggapan bahwa ada esensi tunggal "maskulin" yang berlaku universal. Perspektif pascastrukturalis menekankan bahwa maskulinitas adalah efek dari wacana dan praktik, bukan sebab dari perilaku. Implikasinya adalah bahwa maskulinitas dapat diubah, dinegosiasikan, dan bahkan diresistensikan—baik oleh perempuan maupun oleh laki-laki yang menolak norma-norma yang membatasi.

Tabel 1. Indikator Maskulinitas Hegemonik dan Manifestasinya di Indonesia

Dimensi	Indikator Normatif	Manifestasi di Ruang Publik	Manifestasi di Ruang Privat
Ekonomi	Laki-laki sebagai breadwinner	Diskriminasi upah berbasis gender, hambatan promosi perempuan	Kontrol keuangan rumah tangga secara sepihak oleh suami
Emosional	Pendekatan ekspresi emosi	Budaya "laki-laki pantang menangis", stigma mencari bantuan psikologis	Ketidakmampuan komunikasi emosional dalam pernikahan, kekerasan verbal
Seksual	Dominasi seksual	Pelecehan di tempat kerja, catcalling di ruang umum	Normalisasi hubungan seksual non-konsensual dalam institusi pernikahan
Sosial	Keperwakilan dan otoritas	Underrepresentasi perempuan di parlemen dan jabatan eksekutif	Pengambilan keputusan keluarga yang didominasi suami
Fisik	Kekuatan dan kekerasan	Bullying, hazing, kekerasan geng berbasis gender	Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan fisik terhadap anak

Sumber: Dadaptasi dari Connell (2020), Messerschmidt (2019), dan Suryakusuma (2021)

### Toxic Masculinity: Konsep dan Manifestasi Kontemporer

*Toxic masculinity* merujuk pada sekumpulan norma dan perilaku maskulin yang, meskipun dianggap "ideal" dalam budaya patriarki tertentu, pada kenyataannya menimbulkan

dampak merusak baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki itu sendiri. Kupers (2019) menekankan bahwa kata "toksik" tidak merujuk pada maskulinitas itu sendiri, melainkan pada aspek-aspek tertentu yang dipaksa sebagai norma—terutama yang berkaitan dengan penolakan kerentanan, glorifikasi agresivitas, dan dominasi terhadap pihak yang dianggap lebih lemah.

Anderson dan McCormack (2021) menemukan dalam studi komparatif mereka bahwa meskipun terdapat tren positif menuju "maskulinitas inklusif" di kalangan laki-laki muda perkotaan yang lebih terbuka terhadap ekspresi emosi dan kesetaraan gender, toxic masculinity justru bermigrasi ke ranah digital. Platform media sosial menjadi ruang inkubasi bagi ideologi "manosphere" yang secara aktif mempromosikan misogini, anti-feminisme, dan bahkan kekerasan sebagai respons terhadap "ancaman" feminisme terhadap privilese maskulin.

Dzuhayatin (2022) menganalisis bagaimana toxic masculinity berinteraksi dengan interpretasi agama di Indonesia. Ia menemukan bahwa tafsir patriarkal atas teks-teks agama sering kali digunakan untuk merasionalisasi kontrol laki-laki atas tubuh, mobilitas, dan keputusan perempuan. Fenomena ini sangat nyata dalam konteks pernikahan dan keluarga, di mana konsep tertentu dalam tafsir keagamaan sering digunakan untuk membenarkan pembatasan otonomi perempuan, sementara kewajiban suami untuk berlaku adil dan tidak melakukan kekerasan justru kurang ditekankan.

Data dari Komnas Perempuan (2024) menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender di Indonesia masih pada tingkat yang mengkhawatirkan, dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menyumbang proporsi terbesar dari seluruh laporan kekerasan terhadap perempuan. Angka ini tidak berdiri sendiri—ia mencerminkan normalisasi

kontrol dan kekerasan sebagai instrumen maskulinitas dalam sistem patriarki.

Yang perlu dipahami adalah bahwa toxic masculinity tidak hanya merugikan perempuan. Hearn (2020) menunjukkan bahwa laki-laki yang terperangkap dalam norma maskulinitas toksik memiliki risiko lebih tinggi terhadap gangguan kesehatan mental, perilaku mengambil risiko yang tidak perlu, penolakan untuk mencari bantuan medis dan psikologis, serta angka kematian yang lebih tinggi akibat kecelakaan dan kekerasan. Paradoks toxic masculinity adalah bahwa ia melukai semua pihak sembari mempertahankan ilusi bahwa ia melindungi dan memperkuat laki-laki.

Tabel 2. Dimensi Toxic Masculinity dan Dampaknya

Dimensi Toksik	Norma yang Dipaksakan	Dampak pada Perempuan	Dampak pada Laki-laki
Agresivitas	Laki-laki harus dominan dan agresif	Kekerasan fisik dan psikologis, KDRT	Hambatan regulasi emosi, konflik berulang
Penolakan kerentanan	Tidak boleh menangsang/minta tolong	Beban emosional ganda dalam relasi	Depresi terselubung, penolakan terapi
Kontrol seksual	Kebebasaan seksual laki-laki vs. kontrol seksual perempuan	Kekerasan seksual, victim-blaming	Distorsi relasional, perselingkuhan dinormalisasi
Breadwinner ideology	Pencari nafkah tunggal	Ketergantungan ekonomi yang disengaja	Tekanan keuangan berlebihan, burnout
Anti-efeminasi	Penolakan sifat feminin pada laki-laki	Homofobia struktural yang melukai LGBT+	Stigma terhadap seni, ekspresi, kelemahan

Sumber: Diadaptasi dari Kupers (2019), Hearn (2020), dan Dzuhayatin (2022)

## Feminitas dan Negosiasi Identitas Gender

Jika maskulinitas adalah sisi aktif dari dualisme gender patriarkal, maka feminitas adalah sisi pasif-reseptifnya—setidaknya menurut narasi normatif yang diproduksi patriarki. Lorber (2021) menjelaskan bahwa feminitas dikonstruksi sebagai komplemen dari maskulinitas: di mana maskulinitas diasosiasikan dengan kekuatan, rasionalitas, dan produksi, feminitas diasosiasikan dengan kelemahan, emosionalitas, dan reproduksi. Konstruksi biner ini bukan sekadar deskriptif—ia preskriptif, menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh perempuan (dan laki-laki) agar dianggap "normal."

Butler (2023) menawarkan kerangka performativitas untuk memahami konstruksi feminitas. Gender, bagi Butler, bukanlah ekspresi dari

identitas batin yang sudah ada sebelumnya, melainkan efek dari pengulangan performatif—gestus, ucapan, penampilan fisik—yang menciptakan ilusi substansi gender. Ini tidak berarti bahwa gender adalah pilihan bebas; sebaliknya, performativitas terjadi dalam konteks norma-norma yang sudah ada, dan penyimpangan dari norma tersebut dikenai sanksi sosial, mulai dari ejekan hingga kekerasan.

Kessler dan McKenna (2022) menunjukkan bagaimana proses "gender attribution"—yakni penentuan gender seseorang berdasarkan sinyal-sinyal penampilan—berlangsung secara otomatis dan seringkali tidak disadari. Seseorang yang "terlihat" perempuan diharapkan berperilaku feminin; jika tidak, ia akan menghadapi pertanyaan, tekanan, dan sanksi. Di Indonesia, tekanan normatif terhadap feminitas bahkan lebih kuat karena dipadukan dengan ekspektasi religius dan kultural—perempuan Muslim, misalnya, menghadapi konstruksi ganda tentang "feminitas Islami" yang ideal.

Negosiasi identitas gender adalah proses di mana individu—khususnya perempuan—secara aktif menavigasi, mematuhi sebagian, menolak sebagian, dan mengadaptasi ekspektasi gender yang berlaku. Saraswati (2021) menunjukkan bagaimana perempuan Indonesia bernegosiasi dengan standar kecantikan transnasional sembari mempertahankan penanda kultural tertentu sebagai bentuk resistensi atau afirmasi identitas lokal. Proses ini mencerminkan kompleksitas agensi perempuan dalam konteks dominasi: ia bukan pasif-tunduk sepenuhnya, tetapi juga tidak bebas dari struktur yang membentuknya.

West dan Zimmerman (2019), dalam analisis ulang mereka atas konsep "doing gender," menekankan bahwa negosiasi identitas gender adalah proses interaksional yang terjadi dalam setiap

pertemuan sosial. Implikasinya penting: perubahan norma gender tidak bisa terjadi secara individual saja, melainkan harus melibatkan transformasi dalam interaksi sosial, institusi, dan struktur yang lebih luas.

### **Dominasi Simbolik dalam Ruang Publik dan Privat**

Pierre Bourdieu mengembangkan konsep dominasi simbolik (*domination symbolique*) sebagai salah satu kontribusi teoritis terpentingnya dalam sosiologi gender. Dalam kerangka teori Bourdieu (2022), dominasi gender bukanlah semata-mata produk kekuatan fisik atau pemaksaan hukum, melainkan kekuasaan yang bekerja melalui disposisi yang diperoleh (*habitus*)—cara berjalan, duduk, berbicara, menatap—yang terbentuk dalam proses sosialisasi panjang dan terus-menerus diperbarui melalui pengalaman sosial sehari-hari.

Yang membuat dominasi simbolik begitu efektif dan berbahaya adalah bahwa ia tidak diakui sebagai dominasi. Justru karena dinaturalisasikan sebagai "kodrat" dan "tradisi," para yang didominasi sering kali ikut serta dalam reproduksinya. Mereka menginternalisasi pandangan yang mendominasi tentang diri mereka sendiri: sebagai lemah, emosional, membutuhkan perlindungan, dan cocok untuk peran domestik. Ini bukan "kesalahan" perempuan—ini adalah mekanisme kekuasaan yang bekerja justru melalui penghapusan jejak kekuasaan itu sendiri.

Dalam ruang privat—keluarga dan rumah tangga—dominasi simbolik berlangsung melalui pembagian kerja gender yang "alami." Sunindyo (2019) menunjukkan bagaimana negara Indonesia secara historis memperkuat skema ini melalui kebijakan pendidikan dan program keluarga berencana yang menempatkan perempuan terutama sebagai ibu dan istri. Meskipun telah ada

kemajuan dalam tingkat partisipasi perempuan di pasar kerja, Walby (2020) mengingatkan bahwa "double burden"—beban ganda perempuan yang harus bekerja di luar sekaligus mengurus rumah tangga—masih menjadi realitas dominan yang mencerminkan kelanggengan hierarki gender dalam ruang privat.

Dalam ruang publik, dominasi simbolik bekerja melalui mekanisme yang lebih beragam. Ridgeway (2019) menunjukkan bahwa "status beliefs" berbasis gender—keyakinan bahwa laki-laki secara umum lebih kompeten, lebih berwibawa, dan lebih layak memimpin—terus memengaruhi dinamika interaksi sosial dalam kelompok, tim kerja, dan institusi politik, bahkan ketika orang-orang yang terlibat secara sadar tidak mempercayai keyakinan tersebut. Ini adalah salah satu aspek paling sulit dari dominasi simbolik: ia beroperasi bahkan tanpa niat diskriminatif yang disadari.

Media massa dan media sosial sebagai ruang publik yang semakin dominan di era digital memainkan peran krusial dalam reproduksi dan, dalam beberapa kasus, contestation dominasi simbolik gender. Parker dan Nilan (2023) menemukan bahwa remaja Indonesia yang aktif di media sosial terpapar secara simultan pada narasi patriarkal yang mereproduksi stereotip gender dan narasi feminis yang menantang—sebuah pertarungan wacana yang konsekuensinya sangat bergantung pada literasi digital dan kapasitas kritis pengguna.

### **Resistensi Gerakan Feminis terhadap Dominasi Simbolik**

Gerakan feminis kontemporer merupakan respons terorganisir dan sistematis terhadap dominasi simbolik yang dilanggengkan oleh patriarki. Budiarta (2023) mengidentifikasi tiga modalitas resistensi feminis yang beroperasi secara bersamaan di Indonesia: resistensi institusional

(melalui advokasi kebijakan dan litigasi hukum), resistensi kultural (melalui seni, sastra, dan media), dan resistensi sehari-hari (melalui negosiasi dalam relasi personal dan domestik). Ketiga modalitas ini saling melengkapi namun juga sering bertensi satu sama lain, mencerminkan keragaman orientasi dan strategi dalam gerakan feminis.

Dalam dimensi institusional, gerakan feminis Indonesia berhasil mendorong kemajuan legislatif—termasuk pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 2022 setelah perjuangan panjang lebih dari satu dekade. Namun Robinson (2022) mengingatkan bahwa kemajuan hukum formal tidak otomatis mengubah norma dan praktik sosial yang menopangnya. Implementasi UU TPKS, misalnya, masih menghadapi hambatan dalam bentuk persepsi aparat penegak hukum yang sering kali bias gender, serta stigma sosial yang masih menimpa korban kekerasan seksual.

Resistensi kultural feminis mendapatkan momentum baru melalui platform digital. Gerakan #MeTooIndonesia dan berbagai kampanye media sosial tentang kekerasan seksual di kampus telah menciptakan ruang publik tandingan di mana pengalaman perempuan yang selama ini didiamkan mendapatkan visibilitas dan legitimasi. Martyn (2020) menekankan bahwa sejarah gerakan perempuan Indonesia adalah sejarah perjuangan untuk visibilitas—hak untuk hadir, bersuara, dan didengar dalam ruang publik yang didominasi laki-laki.

Resistensi sehari-hari adalah bentuk resistensi yang paling halus namun juga yang paling luas. Saptari (2019) mendokumentasikan bagaimana perempuan buruh pabrik di Indonesia mengembangkan strategi-strategi halus untuk mempertahankan otonomi mereka dalam sistem yang secara struktural tidak menguntungkan mereka—dari negosiasi

tentang jam kerja dan cuti, hingga membangun jaringan solidaritas sesama perempuan di luar pengawasan manajemen.

Namun, resistensi tidak berlangsung tanpa biaya. Walby (2020) memperingatkan tentang pukulan balik (backlash) terhadap kemajuan feminis—yang mewujud dalam kebangkitan gerakan anti-feminis, konservatisme agama yang reaktif, dan normalisasi misogini dalam ruang digital. Di Indonesia, Dzuhayatin (2022) mencatat meningkatnya retorika anti-gender yang menggunakan bahasa agama untuk menolak perspektif kesetaraan gender, yang dipahami sebagai "agenda Barat" yang mengancam nilai-nilai Islam dan budaya lokal.

Hooks (2019) menawarkan perspektif yang kritis terhadap kecenderungan dalam gerakan feminis untuk berfokus pada identitas individual dengan mengorbankan analisis struktural. Ia berargumen bahwa feminisme yang transformatif harus secara fundamental menantang sistem kapitalisme, rasisme, dan patriarki secara bersamaan—bukan sekadar memperjuangkan inklusi individu perempuan dalam sistem yang sudah ada. Perspektif interseksional ini semakin relevan dalam konteks Indonesia, di mana penindasan gender bersinggungan dengan ketimpangan kelas, diskriminasi etnis, dan eksklusi berdasarkan orientasi seksual.

Tabel 3. Modalitas Resistensi Feminis dan Konteks Operasinya

Modalitas	Bentuk Konkret	Ruang Operasi	Tantangan Utama
Institusional	Advokasi UU TPKS, litigasi hukum, lobi parlemen	Ruang publik formal	Implementasi lemah; aparat bias gender; kriminalisasi aktivis
Kultural	AltaTochIndonesia; seni feminis; media alternatif	Ruang publik digital dan fisik	Backlash digital; doxing; serangan terkoordinasi anti-feminis
Pendidikan	Kurikulum sensitif gender; pelatihan guru; workshop	Institusi pendidikan	Resistensi dari elit konservatif; kurangnya anggaran
Sehari-hari	Negosiasi domestik; solidaritas perempuan; self-care	Ruang privat dan semipublik	Invisibilitas; beban ganda; isolasi individual
Digital	Komunitas online feminis; media sosial; podcast	Ruang digital	Algoritma patriarki; moderasi konten yang diskriminatif

Sumber: Diadaptasi dari Budianta (2023), Walby (2020), Marlyn (2020), dan hooks (2019)

### 3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (literature review) sistematis sebagai pendekatan utama. Kajian literatur sistematis dipilih karena kemampuannya mensintesis temuan-temuan penelitian yang tersebar dari berbagai sumber secara terstruktur, kritis, dan transparan (Moser & Moser, 2023). Proses kajian dilakukan melalui empat tahap berikut.

#### Identifikasi dan Pencarian Literatur

Pencarian dilakukan menggunakan basis data akademik Scopus, Google Scholar, JSTOR, dan ProQuest dalam rentang waktu 2019–2025. Kata kunci yang digunakan meliputi: "masculinity," "femininity," "patriarchy," "toxic masculinity," "feminist resistance," "symbolic domination," "gender identity," dan variasinya dalam bahasa Indonesia ("maskulinitas," "feminitas," "patriarki," "gerakan feminis," "dominasi simbolik"). Pencarian awal menghasilkan lebih dari 840 artikel.

#### Seleksi Literatur

Kriteria inklusi yang diterapkan adalah: (a) artikel jurnal peer-reviewed; (b) diterbitkan antara 2019–2025; (c) membahas minimal dua dari empat tema utama penelitian; (d) tersedia teks lengkap. Kriteria eksklusi meliputi: (a) opini atau editorial tanpa kajian empiris; (b) artikel di luar konteks gender/patriarki; (c) duplikasi. Setelah penyaringan judul dan abstrak, diperoleh 87 artikel untuk dikaji lebih lanjut.

#### Seleksi Final dan Analisis

Dari 87 artikel, dilakukan pembacaan teks lengkap dan penilaian kualitas metodologis menggunakan PRISMA framework. Enam artikel dipilih sebagai artikel pembanding utama berdasarkan relevansi tematik,

kedalaman analisis, dan representasi konteks yang beragam (Barat dan Indonesia). Data diekstraksi menggunakan matriks yang mencakup: konteks penelitian, pendekatan teoritis, metode, temuan utama, dan kontribusi terhadap tema kajian. Sintesis dilakukan secara naratif-analitis.

Kerangka teoritis yang digunakan mencakup: konsep maskulinitas hegemonik (Connell, 2020), performativitas gender (Butler, 2023), dominasi simbolik (Bourdieu, 2022), dan interseksionalitas (Hooks, 2019).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan dari kajian literatur ini mengkonfirmasi bahwa konstruksi maskulinitas dan feminitas dalam sistem patriarki kontemporer merupakan proses yang kompleks, berlapis, dan dinamis. Tidak ada "patriarki tunggal" yang beroperasi dengan cara seragam; ia mengambil bentuk berbeda dalam konteks budaya, agama, dan historis yang berbeda—namun dengan hasil yang konsisten: subordinasi perempuan dan keterbatasan kebebasan semua individu yang tidak memenuhi norma gender yang berlaku (Walby, 2020; Johnson, 2022).

*Toxic masculinity* muncul dari kajian ini bukan sebagai "penyakit individual" melainkan sebagai gejala struktural dari sistem patriarki yang membutuhkan laki-laki untuk terus membuktikan dan mempertahankan status dominasinya. Solusinya, oleh karenanya, tidak bisa dibatasi pada perubahan perilaku individual—ia memerlukan dekonstruksi struktur yang memproduksi dan mereproduksi *toxic masculinity*: mulai dari pola pengasuhan, sistem pendidikan, representasi media, hingga kebijakan publik (Kimmel, 2019; Anderson & McCormack, 2021).

Dominasi simbolik sebagai mekanisme utama kelanggengan patriarki

menjadi temuan konsisten di seluruh literatur yang dikaji. Keistimewaan analitis Bourdieu (2022) terletak pada kemampuannya menjelaskan mengapa perubahan nilai saja tidak cukup untuk mengubah relasi gender: selama habitus dan field (medan sosial) yang mereproduksi dominasi simbolik belum berubah, individu—bahkan yang secara kognitif telah menerima nilai kesetaraan gender—masih cenderung mereproduksi perilaku yang tidak setara dalam praktik sehari-hari.

Resistensi feminis, meskipun menghadapi berbagai hambatan, telah berhasil membuka ruang-ruang baru bagi negosiasi identitas gender yang lebih bebas dan adil. Hal yang dibutuhkan adalah konsolidasi antara berbagai modalitas resistensi—institusional, kultural, dan sehari-hari—serta aliansi dengan kelompok-kelompok lain yang juga berkepentingan dengan demokratisasi relasi sosial (hooks, 2019; Budiarta, 2023). Konteks Indonesia menghadirkan tantangan unik berupa persinggungan antara agenda feminis dan sensitivitas keagamaan, yang memerlukan pendekatan dialogis yang tidak mengabaikan dimensi nilai-nilai yang dianut komunitas.

#### 5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan lima proposisi utama berdasarkan kajian literatur sistematis. Pertama, maskulinitas dan feminitas adalah konstruksi sosial yang diproduksi dan direproduksi melalui praktik-praktik patriarki yang beroperasi di seluruh institusi sosial—dari keluarga, pendidikan, hingga media dan kebijakan publik. Kedua, *toxic masculinity* adalah manifestasi ekstrem dari norma maskulinitas hegemonik yang merugikan semua gender, bukan hanya perempuan. Ketiga, dominasi simbolik beroperasi melalui internalisasi norma yang menaturalisasikan ketimpangan gender, menjadikannya sulit ditantang justru

karena tidak terlihat sebagai kekuasaan. Keempat, resistensi feminis kontemporer mengambil berbagai bentuk—institusional, kultural, digital, dan sehari-hari—yang masing-masing penting dan saling melengkapi. Kelima, perubahan struktural yang bermakna memerlukan pendekatan interseksional yang mengakui kompleksitas pengalaman gender dalam konteks Indonesia yang beragam secara budaya, agama, dan kelas.

Keterbatasan kajian ini terletak pada fokusnya pada literatur berbahasa Indonesia dan Inggris, yang mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan keragaman pengalaman gender di kepulauan Indonesia. Penelitian lanjutan dengan metodologi empiris—survei, etnografi, analisis wacana, atau studi kasus—diperlukan untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana norma-norma gender ini benar-benar beroperasi dalam kehidupan sehari-hari berbagai komunitas. Penelitian komparatif lintas daerah juga disarankan mengingat keragaman konstruksi gender di berbagai suku dan budaya di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, E., & McCormack, M. (2021). Inclusive masculinity theory: Overview, reflection, and refinement. *Journal of Gender Studies*, 30(5), 547–561. <https://doi.org/10.1080/09589236.2021.1884460>
- Blackwood, E. (2021). *Webs of power: Women, kin, and community in a Sumatran village* (Updated ed.). Rowman & Littlefield.
- Bourdieu, P. (2022). *La domination masculine* (Edisi Terjemahan Baru, trans. R. Nice). Polity Press.
- Budianta, M. (2023). *Feminisme dan ruang publik di Indonesia: Dinamika kontemporer*. Jurnal Perempuan, 28(1), 5–22.
- Butler, J. (2023). *Who's afraid of gender?* Farrar, Straus and Giroux.
- Connell, R. W. (2020). Masculinities and globalization. In M. Flood & R. Howson (Eds.), *Engaging men in building gender equality* (pp. 31–51). Cambridge Scholars Publishing.
- Davies, S. G. (2020). *Challenging gender norms: Five genders among Bugis in Indonesia* (Revised ed.). Waveland Press.
- Dzuhayatin, S. R. (2022). Maskulinitas toksik dalam perspektif Islam dan gerakan perempuan di Indonesia. *Jurnal Studi Islam dan Gender*, 5(1), 23–45.
- Hearn, J. (2020). Men, masculinities, and the material(-)discursive. *NORMA: International Journal for Masculinity Studies*, 15(1), 5–20. <https://doi.org/10.1080/18902138.2019.1654818>
- hooks, b. (2019). *All about love: New visions* (Revised ed.). William Morrow.
- Johnson, A. G. (2022). *The gender knot: Unraveling our patriarchal legacy* (3rd ed.). Temple University Press.
- Kessler, S. J., & McKenna, W. (2022). *Gender: An ethnomethodological approach* (Updated ed.). University of Chicago Press.
- Kimmel, M. (2019). *Healing from hate: How young men get into—and out of—violent extremism*. University of California Press.
- Komnas Perempuan. (2024). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2024*. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Kupers, T. A. (2019). Toxic masculinity as a barrier to mental health treatment in prison. *Journal of*

- Clinical Psychology, 75(12), 2279–2289.  
<https://doi.org/10.1002/jclp.22690>
- Lorber, J. (2021). *Paradoxes of gender* (3rd ed.). Yale University Press.
- Martyn, E. (2020). *The women's movement in post-colonial Indonesia: Gender and nation in a new democracy* (2nd ed.). Routledge.
- Messerschmidt, J. W. (2019). The salience of “hegemonic masculinity.” *Men and Masculinities*, 22(1), 85–91.  
<https://doi.org/10.1177/1097184X18805555>
- Moser, C., & Moser, A. (2023). Gender mainstreaming since Beijing: Has it worked? *Gender & Development*, 31(1–2), 15–35.  
<https://doi.org/10.1080/13552074.2023.2195432>
- Parker, L., & Nilan, P. (2023). *Adolescents in contemporary Indonesia* (2nd ed.). Routledge.
- Prabasmoro, A. P. (2022). Representasi feminis dalam media digital Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 27(2), 112–128.
- Ridgeway, C. L. (2019). *Status: Why is it everywhere? Why does it matter?* Russell Sage Foundation.
- Robinson, K. (2022). *Gender, Islam, and democracy in Indonesia* (2nd ed.). Routledge.
- Saptari, R. (2019). Women's labor and the politics of reproduction in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 51(3), 398–417.  
<https://doi.org/10.1080/14672715.2019.1617020>
- Saraswati, L. A. (2021). *Seeing beauty, sensing race in transnational Indonesia* (2nd ed.). University of Hawai'i Press.
- Sen, K. (2021). Indonesian women at work: Reframing the subject. *Gender, Place & Culture*, 28(4), 567–585.  
<https://doi.org/10.1080/0966369X.2020.1750305>
- Sunindyo, S. (2019). Gender discourse and state ideology in Indonesia. *Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific*, 44, 1–12.
- Suryakusuma, J. (2021). State ibuism and the patriarchal bargain in Indonesia. *Asian Studies Review*, 45(1), 1–17.  
<https://doi.org/10.1080/10357823.2021.1876222>
- Walby, S. (2020). Varieties of gender regimes. *Social Politics*, 27(3), 414–431.  
<https://doi.org/10.1093/sp/jxz066>
- Waling, A. (2019). Rethinking masculinity studies: Feminism, masculinity, and poststructural accounts of agency and emotional reflexivity. *The Journal of Men's Studies*, 27(1), 89–107.  
<https://doi.org/10.1177/1060826518782980>
- West, C., & Zimmerman, D. H. (2019). Accounting for doing gender. *Gender & Society*, 33(1), 3–22.  
<https://doi.org/10.1177/0891243218811559>